

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai peran legislatif terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* pemerintah di Kota Tegal Tahun 2018 dengan studi kasus RSUD Kardinah Kota Tegal, maka dapat ditarik kesimpulan peran lembaga legislatif Kota Tegal dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah menjalankan 5 (lima) prinsip *good governance* yaitu sebagai berikut:

##### **1. Efektif dan Efisien**

DPRD Kota Tegal telah melakukan prinsip *good governance* efektif dan efisien di RSUD Kardinah, dimana hal ini dibuktikan dengan tingkat kemandirian keuangan BLUD Rumah Sakit yang dapat mencapai 124,61% dengan mendapat nilai kategori sangat baik, tidak hanya itu saja, capaian terkait indeks kepuasan masyarakat juga melampaui target yaitu dengan mendapat nilai sebesar 80,71% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Hal ini tidak lepas dari kerja sama antara DPRD dan Pemerintah di RSUD yang aktif melakukan koordinasi guna meningkatkan pelayanan kesehatan.

##### **2. Akuntabilitas**

Dengan dilakukannya rapat kerja bersama yang dilakukan antara DPRD Kota Tegal dengan Pemerintah RSUD Kardinah menghasilkan akuntabilitas pada penggunaan anggaran di RSUD Kardinah. Walaupun

akuntabilitas secara keseluruhan bagi BLUD menunjukkan anggaran defisit, akan tetapi anggaran defisit bagi OPD pada Pemerintah Daerah sudah layak karena sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah sumber dananya diperoleh dari penerimaan PAD Kota, APBD, hibah, serta APBN melalui DAK.

### 3. Partisipasi Masyarakat

DPRD Kota Tegal dalam menjalankan prinsip *good governance* telah menjalankan prinsip partisipasi masyarakat, bagaimana dalam menjalankan dan fungsinya DPRD Kota Tegal melibatkan masyarakat, melalui reses ataupun public hearing atau tatap muka lainnya, baik terkait pengambilan kebijakan maupun menjaring aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan Kota Tegal.

### 4. Daya Tanggap

Terkait daya tanggap juga telah dimiliki oleh DPRD Kota Tegal baik kepada pemerintah maupun masyarakat. Dengan pemerintah sering kali DPRD melakukan rapat kerja sama dengan melakukan pemanggilan OPD khususnya Kardinah saat terjadi permasalahan BPJS. Begitupun dengan masyarakat, DPRD Kota Tegal juga cepat merespon terkait permasalahan yang dimiliki masyarakat.

### 5. Visi Strategis

DPRD Kota Tegal juga mendukung visi strategis yang dilakukan oleh OPD RSUD Kardinah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, dimana hal ini dibuktikan dengan adanya tambahan anggaran pengadaan

alat-alat kesehatan Rumah Sakit yang bersumber dari DAK sebesar Rp 17.703.439.000. Hal ini DPRD mempunyai visi yang strategis dalam menerapkan prinsip *good governance* dengan mempertimbangkan segala skala prioritas yang ada tentunya.

## **B. SARAN**

Dari hasil penelitian adapun saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi anggota DPRD Kota Tegal dalam menjalankan fungsinya yaitu perlunya menerapkan prinsip transparansi anggaran agar seluruh masyarakat Kota Tegal dapat mengakses atau mengikuti anggaran yang dipunyai Kota Tegal dalam jangka satu tahun ke depan sekaligus masyarakat dapat mengawal keuangan APBD guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya perlunya perpindahan tempat dalam melakukan jaringan aspirasi masyarakat (reses), sering kali anggota dewan melakukan reses hanya di daerah pemenangannya saja, sehingga aspirasi yang didapatkan kurang maksimal. Oleh karena itu berpindah tempatnya dalam melakukan reses perlu dilakukan agar aspirasi yang tersaring dapat maksimal untuk disalurkan kepada anggota dewan.